

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) benar-benar menjadi pilar tangguh dalam pembangunan perekonomian negara. Hal ini juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Begitupun halnya di negara-negara yang sudah di kategorikan sebagai negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis dan Kanada, negara-negara tersebut pun mengakui bahwa UMKM menjadi motor penggerak ekonomi yang sangat penting dan proses pertumbuhan teknologi di negara-negara tersebut. Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah terbukti memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan ekonomi di dunia, terkhusus di Indonesia. Terbukti bahwasannya UMKM dapat bertahan dari krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1999 dan 2008.

Sejak krisis moneter melanda, hampir 80% usaha besar mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK massal terhadap karyawannya. Alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkatkan jumlah pada masa krisis yaitu karena sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri dan tidak mendapatkan modal dari bank dan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memperhatikan pekerjaannya, sehingga para pengangguran tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil akibatnya jumlah UMKM meningkat. Krisis ekonomi yang dialami pada tahun 2008 memiliki kesamaan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1999, sama-sama berawal dari krisis keuangan. Namun yang menjadi perbedaan yaitu pada tahun 1999 krisis dialami dalam skala Asia, namun Indonesia menjadi negara yang paling terpuruk. Sedangkan pada tahun 2008 merupakan krisis ekonomi yang dialami secara global.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan

bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai Rp 10 milyar dan omzet total Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

Di Indonesia, sumber penghidupan bergantung pada sektor UMKM dan sektor usaha kecil terkonsentrasikan pada bidang perdagangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu serta produksi mineral non logam. UMKM juga berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah, mendorong pemanfaatan sumber daya lokal, pemerataan serta pengentasan kemiskinan dan tempat sebagai pemasok bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan besar. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, salah satu peranan UMKM yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UMKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar.

Pemerintah Daerah harus mampu melakukan pemetaan potensi usaha yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemetaan yang dimaksud adalah pemetaan yang didasari sumber daya alam, sumber daya manusia, lembaga-lembaga yang terdapat pada daerah tersebut, karakteristik wilayah, dsb. Hal-hal tersebut tentunya dapat

berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dipilih dan diimplementasikan oleh pemerintah setempat, yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam perumusan strategi atau kebijakan yang mengatur UMKM dan upaya dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Seiringan dengan adanya UU Otonomi Daerah, maka setiap pemerintahan daerah saling bersaing dan menggali potensi guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Desa Pusakasari yang memiliki banyak potensi sumber daya alam dan pelaku UMKM diderahnya terus menerus memikirkan perkembangan ekonomi masyarakat, potensi pasar produknya masih dirasa kurang dikarenakan keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM terkait pentingnya kemasan dan label dari suatu produk. Padahal *design packaging* dan *labelling* merupakan hal penting dari sebuah produk, tidak hanya menyangkut estetika tetapi juga keamanan dan ketahanan dari produk tersebut. Berkaitan dengan estetika, tentu saja keindahan *packaging* dan *label* berguna untuk menarik minat, menjaga kualitas produk dan dapat menjadi daya saing bagi produk lain diluar sana. Para pakar pemasaran menyebut bahwa *design packaging* dan *labelling* sebagai pesona dari produk, sebab kemasan memang berada di tingkat akhir suatu proses alur produksi yang bukan hanya untuk memikat mata tetapi juga untuk memikat pemakaian.

Masih dirasa kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat Desa Pusakasari terhadap inovasi dari produk yang mereka punya, pemerintahan setempat yang berkontribusi dan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Ciamis bermaksud untuk melaksanakan pelatihan *packaging* dan *labelling* pada produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pusakasari Kec. Cipaku Kab. Ciamis. Demikian halnya akan keberlangsungan pelatihan tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari pelibatan dan partisipasi masyarakat beserta *stackholders*. Guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, tentunya harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelatihan berlangsung.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup kelurahan, yang dimaksud kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 1

ayat 5 disebutkan bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Penetapan kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah dibawah kecamatan dimaksud dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan.

Peran pemerintah dalam pelatihan saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, serta motivator dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. Masyarakat lah sebagai pelaku utama pelatihan, dimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian yang dianggap dapat mengatasi kesenjangan kualitas ataupun kompetensi yang terjadi. Agar adanya keselarasan antara tujuan yang ingin dicapai pemerintah dan keinginan dari masyarakat, maka sangatlah penting masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelatihan.

Kemasan produk UMKM di Desa Pusakasari kebanyakan hanya menggunakan plastik tipis bening dan di perkuat dengan pemanas manual dari radiasi api diatas lilin, sehingga identitas mitra tidak terlihat pada produk UMKM. Perbaikan kemasan produk merupakan strategi yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada produk mereka. Namun demikian, perbaikan kemasan hanya merupakan salah satu elemen dari strategi produk, sehingga dampak dari kemasan terhadap keberhasilan pemasaran produk juga tergantung pada elemen pemasaran lain seperti distribusi dan promosi produk.

Yang menjadi titik terpenting dilakukannya penelitian ini merupakan proses dalam Pelatihan *Packaging* dan *Labelling* Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pusakasari Kec. Cipaku Kab. Camis. Maka dari itulah peneliti tertarik untuk mengambil judul “*Pelatihan Packaging dan Labelling Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih banyak kemasan produk UMKM di Desa Pusakasari yang menggunakan fasilitas sederhana.
- 2) Masih banyak pelaku UMKM Desa Pusakasari yang tidak mengetahui manfaat *packaging* dan *labelling* dalam setiap produk.
- 3) Masih kurangnya daya jual dari produk yang dimiliki pelaku UMKM.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana proses Pelatihan *Packaging* dan *Labelling* Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pusakasari Kec. Cipaku Kab. Ciamis?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang di paparkan, maka tujuan dari permasalahan tersebut yaitu mendeskripsikan proses Pelatihan *Packaging* dan *Labelling* Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Pusakasari Kec. Cipaku Kab. Ciamis.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan dunia pendidikan masyarakat, mengenai pelatihan masyarakat yang di khusukan dan diterapkan guna mencapai kemajuan pada daerah.
- b. Untuk dijadikan bahan perbandingan, pertimbangan, dan pengembangan pada penelitian dimasa yang akan mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, selaku pembelajaran untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang riset ilmiah. Dengan melaksanakan penelitian hendak mengenali

secara langsung bagaimana proses pelatihan melalui kegiatan Pelatihan *Packaging* dan *Labelling* produk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

- b. Bagi warga masyarakat khususnya di Desa Pusakasari, sebagai motivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam membangun jati dirinya menjadi berdaya, lebih baik, mandiri dan sejahtera melalui produk UMKM.
- c. Bagi pemerintah daerah sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelatihan masyarakat diberbagai bidang, terutama dibidang UMKM.

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan seperangkat nilai yang berupa simbol atau konsep dalam penelitian yang dapat diukur dan diamati agar hasil penelitian diketahui dan memudahkan pengukuran dan penelitian, maka variabel-variabel dalam penelitian didefinisikan dalam bentuk definisi operasional. Dalam penelitian ini bentuk operasionalnya adalah:

1.6.1 Pelatihan *Packaging* dan *Labelling*

Pelatihan adalah pengembangan keterampilan seseorang, baik keterampilan teknik maupun non teknik yang akan mampu menjadikannya terampil dalam bidang tertentu yang diinginkan dan mengerti tata cara kerja dan peraturan kerja. *Packaging* atau kemasan adalah kegiatan mendesain dan memproduksi. *Labelling* adalah pemberian julukan, cap, ataupun merek yang dibuatkan produsen untuk produk guna lebih dikenali konsumen. Jadi pelatihan *packaging* dan *labelling* adalah proses pengembangan keterampilan seseorang dalam mendesain kemasan dan label atau merek terhadap suatu produk.

1.6.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan dan atau badan usaha

bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak dari usaha menengah ataupun besar dan memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak dengan usaha kecil atau besar dan memenuhi kriteria usaha menengah.